

Inovasi SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi): Model Pengendalian Inflasi Daerah Berbasis Kolaborasi dalam Mendukung Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting

SABUMI Innovation (Sabilulungan for Stable Prices in Sukabumi Regency): A Collaborative Governance Model for Regional Inflation Control in Supporting Price Stability of Essential and Strategic Goods.

**Yana Chefiana¹, Daden Suhendi², Awal Fajri³, Engkus Kusmayadi⁴,
Rivaldi Muslim R⁵, M. Alrizky Ekiawan⁶**
^{1,2}Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
email: chefy_ana@yahoo.com

ABSTRACT

Food price stability is a key factor in maintaining regional food security and controlling inflation. Sukabumi Regency faces significant challenges in stabilizing staple food prices due to the limited coverage of conventional market operations, dependence on government funding, and the complexity of food distribution across its extensive geographical area. In response to these challenges, the Sukabumi Regency Government introduced SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi) as a collaborative public service innovation designed to improve the effectiveness of regional food price stabilization. This study aims to analyze the implementation of SABUMI as a public service innovation in supporting regional inflation control. A qualitative case study approach was employed, with data collected through document analysis, observation, and a review of official innovation documents. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that SABUMI introduces several innovative features, including a mobile service approach, an accessible community-based service request mechanism, and a blended financing scheme involving local government, BULOG, village-owned enterprises (BUMDes), private distributors, and local communities. The implementation of SABUMI has strengthened stakeholder collaboration in improving food affordability, ensuring food availability, and enhancing distribution efficiency, thereby contributing to the stability of the Regional Price Development Index (Indeks Perkembangan Harga/IPH) in Sukabumi Regency. From the perspectives of Diffusion of Innovation and Collaborative Governance, SABUMI demonstrates the characteristics of an adaptive, practical, and observable innovation that effectively addresses local challenges in food price stabilization. This study concludes that SABUMI represents a best practice in public service innovation and offers a replicable model for strengthening regional inflation control and food security in other regions with similar socio-economic and geographical characteristics.

Keywords: SABUMI; regional inflation control; food price stability; food security; collaborative governance.

ABSTRAK

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan dalam pengendalian harga bahan pokok akibat keterbatasan jangkauan operasi pasar konvensional, ketergantungan pada anggaran pemerintah, serta kompleksitas distribusi pada wilayah yang luas. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi

mengembangkan inovasi SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi) sebagai model pelayanan publik berbasis kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi harga pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SABUMI sebagai inovasi pelayanan publik dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan telaah terhadap dokumen inovasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SABUMI menghadirkan pembaruan melalui pelayanan bergerak (*mobile service*), mekanisme permohonan yang mudah diakses masyarakat, serta skema pendanaan campuran (*blended financing*) yang melibatkan pemerintah, BULOG, BUMDes, pelaku usaha, dan masyarakat. Implementasi SABUMI memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam mendukung keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pangan sehingga berkontribusi terhadap stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Sukabumi. Ditinjau dari perspektif *Diffusion of Innovation* dan *Collaborative Governance*, SABUMI memenuhi karakteristik inovasi yang adaptif, mudah diimplementasikan, dan memiliki manfaat yang dapat diamati secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SABUMI merupakan praktik baik inovasi pelayanan publik yang berpotensi direplikasi sebagai strategi pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan sebagai wujud implementasi strategi 4K pengendalian inflasi yaitu Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Kata kunci: SABUMI; pengendalian inflasi; stabilitas harga pangan; Ketahanan pangan; collaborative governance.

PENDAHULUAN

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus menjamin ketahanan pangan masyarakat. Fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas pangan strategis, tidak hanya berdampak pada tingkat inflasi, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah (FAO, 2023; Bank Indonesia, 2024). Oleh karena itu, pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Inflasi pangan (*volatile food inflation*) masih menjadi penyumbang utama inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Karakteristik komoditas pangan yang mudah mengalami gangguan produksi, distribusi, maupun perubahan permintaan

menyebabkan harga pangan relatif lebih berfluktuasi dibandingkan kelompok komoditas lainnya (Bank Indonesia, 2024).

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek aksesibilitas, keterjangkauan, distribusi dan keberlanjutan sistem pangan. Gangguan distribusi akibat bencana maupun gejolak harga dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang layak sehingga diperlukan inovasi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan (Sukmawani & Astutiningsih, 2025)

Gangguan cuaca, bencana alam, keterbatasan pasokan, tingginya biaya distribusi, hingga praktik spekulasi pasar merupakan beberapa faktor yang sering memicu kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat

yang tinggal di wilayah pedesaan maupun daerah yang memiliki akses pasar terbatas sehingga memerlukan intervensi pemerintah yang cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan (BPS, 2025).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengendalian inflasi sebagai salah satu agenda strategis nasional melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga melalui implementasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2023). Berbagai program telah dilaksanakan, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, Gerakan Tanam Cepat Panen, kerja sama antar daerah (KAD), hingga penguatan cadangan pangan pemerintah. Meskipun demikian, implementasi berbagai program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, cakupan pelayanan yang belum menjangkau seluruh wilayah, serta pelaksanaan kegiatan yang umumnya bersifat insidental ketika terjadi lonjakan harga.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sebagai wilayah dengan cakupan geografis yang luas serta terdiri atas ratusan desa yang tersebar hingga wilayah pegunungan dan pesisir, distribusi bahan pangan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah maupun Operasi Pasar sebelumnya masih terkonsentrasi di pusat-pusat kecamatan dan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah daerah sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat mengharapkan pelayanan stabilisasi harga yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu ketika terjadi gejolak harga bahan pokok. Kondisi tersebut menjadi dasar lahirnya inovasi SABUMI

(Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi) sebagai model pelayanan publik yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), memperkuat distribusi pangan, serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

SABUMI merupakan inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan pelayanan mobile, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta pendanaan campuran (*blended financing*) antara APBD dan sumber non-APBD. Pendekatan tersebut memungkinkan layanan stabilisasi harga dilaksanakan secara lebih fleksibel, tidak hanya bergantung pada siklus anggaran pemerintah, tetapi juga mampu menjangkau desa-desa yang jauh dari akses pasar. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan melalui media komunikasi yang sederhana sehingga respon terhadap gejolak harga menjadi lebih cepat dan adaptif. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa SABUMI tidak sekadar kegiatan operasi pasar dengan menyediakan harga pangan yang murah, tetapi telah berkembang menjadi sebuah model inovasi pelayanan publik bidang sosial ekonomi berbasis kolaborasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif teori inovasi sektor publik, keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan publik (OECD, 2019). Rogers (2003) menjelaskan bahwa suatu inovasi akan lebih mudah diadopsi apabila memberikan keuntungan relatif (*relative advantage*), sesuai dengan kebutuhan pengguna (*compatibility*), mudah diterapkan (*simplicity*), dapat diuji (*trialability*), dan hasilnya dapat diamati (*observability*). Karakteristik tersebut tampak pada implementasi SABUMI yang menawarkan keunggulan berupa pelayanan bergerak, mekanisme permohonan yang

sederhana, distribusi bahan pokok menjangkau wilayah terpencil, serta fleksibilitas pembiayaan sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di daerah.

Di sisi lain, keberhasilan pengendalian inflasi daerah memerlukan sinergi berbagai aktor, baik pemerintah, pelaku usaha, BUMN, BUMDes, maupun masyarakat. Perspektif *collaborative governance* menekankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks membutuhkan kerja sama lintas organisasi melalui proses koordinasi, kepercayaan, dan komitmen bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam implementasinya, SABUMI melibatkan berbagai mitra penyedia pangan, pemerintah desa, kecamatan, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga membentuk jejaring kolaboratif yang memperkuat efektivitas distribusi pangan sekaligus mempercepat respon terhadap gejolak harga.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, maupun kebijakan pengendalian inflasi daerah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi program konvensional yang bergantung pada anggaran pemerintah dan belum banyak mengkaji inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan pelayanan mobile, kolaborasi multipihak, serta skema pembiayaan alternatif dalam satu model pelayanan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait model inovasi pengendalian inflasi yang adaptif terhadap kondisi geografis, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan masyarakat di daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi SABUMI sebagai model inovasi pelayanan publik dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep inovasi pelayanan publik dan *collaborative governance* dalam

pengendalian inflasi daerah, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan model stabilisasi harga pangan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk menganalisis implementasi inovasi SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi) sebagai model pelayanan publik dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Sukabumi. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap proses perencanaan, implementasi, mekanisme kolaborasi, serta dampak inovasi dalam konteks nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah (Yin, 2018).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada pelaksanaan inovasi SABUMI yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Penelitian difokuskan pada proses inovasi, mekanisme pelayanan, pola kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kontribusi program terhadap stabilitas harga bahan pokok dan pengendalian Indeks Perkembangan Harga (IPH). Informasi mengenai mekanisme layanan, tujuan, sasaran, dan implementasi SABUMI mengacu pada dokumen inovasi yang menjadi objek penelitian.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi unsur

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah pengampu inovasi, pemerintah kecamatan dan desa, mitra penyedia bahan pangan, serta masyarakat penerima manfaat program. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses implementasi, kendala, dan manfaat inovasi.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi dokumen inovasi SABUMI, laporan pelaksanaan kegiatan, data Indeks Perkembangan Harga (IPH), data jumlah penerima manfaat, dokumen kebijakan pemerintah mengenai pengendalian inflasi, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan berupa jurnal nasional maupun internasional. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara sekaligus memverifikasi informasi yang diperoleh dari para informan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme pelayanan SABUMI, mulai dari proses pengajuan permohonan masyarakat, pengadaan bahan pokok, distribusi, hingga pelaksanaan pelayanan di lokasi sasaran. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi para pemangku kepentingan mengenai efektivitas inovasi, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung mengenai pelaksanaan program, perkembangan harga pangan, serta capaian inovasi.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi

metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

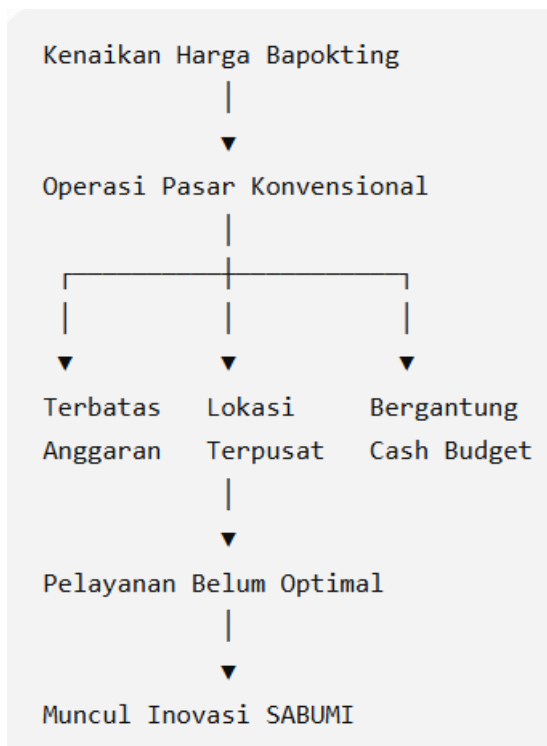
Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Tahapan analisis diawali dengan mengorganisasikan seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilakukan proses reduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan sehingga memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan penelitian terhadap konsep inovasi sektor publik, *collaborative governance*, serta strategi pengendalian inflasi daerah.

Untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian, analisis dilakukan menggunakan perspektif Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003) dan Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008). Teori Difusi Inovasi digunakan untuk menganalisis karakteristik kebaruan SABUMI berdasarkan aspek *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Sementara itu, kerangka *Collaborative Governance* digunakan untuk mengkaji bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha,

BUMDes, penyedia pangan, serta masyarakat dalam mendukung efektivitas pelaksanaan inovasi. Analisis kedua perspektif tersebut diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan SABUMI sebagai model inovasi pelayanan publik dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sukabumi



Gambar 1. Kerangka Permasalahan Pengendalian Inflasi sebelum SABUMI

Sumber: Diolah dari Dokumen Inovasi SABUMI

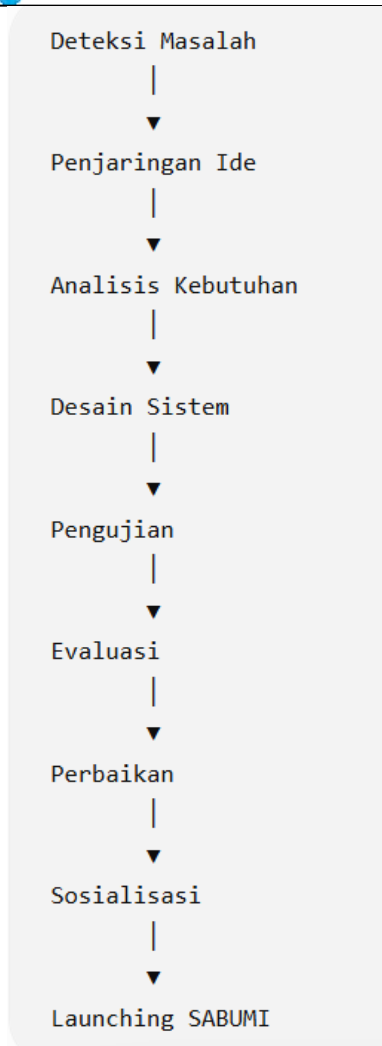
Pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sebagai kabupaten dengan wilayah yang luas dan terdiri atas 386 desa dan kelurahan, Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan dalam menjamin keterjangkauan

harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat. Sebaran wilayah yang mencakup daerah pegunungan, pesisir, dan kawasan yang relatif jauh dari pusat perdagangan menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas harga antarwilayah sehingga memengaruhi daya beli masyarakat.

Sebelum inovasi SABUMI diterapkan, strategi pengendalian inflasi lebih banyak dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM). Meskipun kedua program tersebut mampu membantu menurunkan tekanan harga pada waktu tertentu, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, kegiatan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah sehingga frekuensi pelaksanaannya relatif terbatas. Kedua, lokasi pelayanan umumnya dilaksanakan di pusat kecamatan atau kawasan yang mudah dijangkau sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil belum memperoleh manfaat secara optimal. Ketiga, pelaksanaan operasi pasar bersifat insidental sehingga belum mampu memberikan respon yang cepat terhadap gejolak harga yang terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi yang mampu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan fleksibilitas pelaksanaan program.

Lahirnya Inovasi SABUMI

SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik untuk menjawab berbagai keterbatasan pelaksanaan operasi pasar konvensional secara resmi dilaunching pada tanggal 13 Februari 2026 dengan dikeluarkannya keputusan Bupati Sukabumi Nomor 500.2.1/Kep. 211-Ekon/2026 tentang Mobil Sabilulungan Untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi.



Gambar 2. Tahapan Pengembangan Inovasi SABUMI

Inovasi ini dirancang melalui tahapan identifikasi masalah, penjaringan ide, analisis kebutuhan, penyusunan sistem pelayanan, pengujian, evaluasi, hingga peluncuran program secara resmi. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SABUMI dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Tujuan utama SABUMI adalah memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), menjaga stabilitas harga pangan, serta membantu mengendalikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Selain itu, inovasi ini diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya kelompok

berpendapatan rendah, melalui penyediaan bahan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Program ini juga mendukung kelancaran distribusi pangan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh kegiatan operasi pasar reguler.

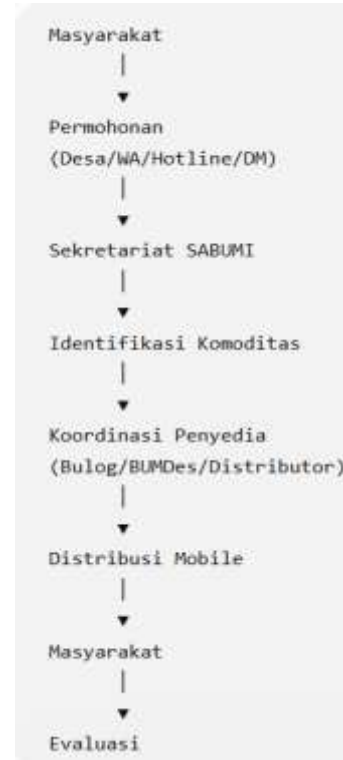
Tabel 1. Keunggulan SABUMI dibanding Operasi Pasar Konvensional

Aspek	Operasi Pasar Konvensional	SABUMI
Lokasi	Berserakan	Desa sasaran
Waktu	Terjadwal	Rakorbel
Pembiayaan	APBD	APBD + Non APBD
Pemeliharaan	Pemerintah	Masyarakat
Distribusi	Statis	Mobile
Pembayaran	Tunai	Tunai & Non Tunai

Sumber: Diolah dari Dokumen SABUMI (2026)

Implementasi Inovasi SABUMI

Implementasi SABUMI dilakukan melalui mekanisme pelayanan yang sederhana dan mudah diakses masyarakat.



Gambar 3. Mekanisme Pelayanan SABUMI

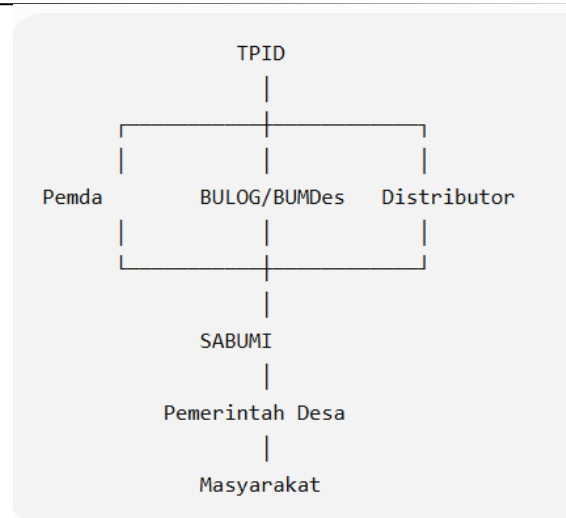
Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok, masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan melalui pemerintah desa, kecamatan, hotline, maupun media

sosial. Selanjutnya sekretariat SABUMI melakukan identifikasi kebutuhan komoditas yang memerlukan intervensi harga. Setelah kebutuhan ditetapkan, dilakukan koordinasi dengan mitra penyedia pangan seperti BULOG, BUMDes, distributor, maupun pelaku usaha lainnya sebelum distribusi dilaksanakan ke lokasi sasaran. Tahapan tersebut diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan sebagai dasar perbaikan layanan berikutnya.

Salah satu karakteristik utama SABUMI adalah penggunaan pelayanan bergerak (*mobile service*). Berbeda dengan operasi pasar konvensional yang menunggu masyarakat datang ke lokasi tertentu, SABUMI justru mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menjangkau desa-desa yang jauh dari akses pasar sehingga manfaat program menjadi lebih merata.

Selain pelayanan bergerak, SABUMI juga menerapkan skema pendanaan campuran (*blended financing*) yang memadukan dana APBD dengan sumber pendanaan non-APBD. Model pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pelayanan sehingga kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus pencairan anggaran pemerintah. Dengan demikian, respon terhadap gejolak harga dapat dilakukan lebih cepat ketika masyarakat membutuhkan intervensi. Kolaborasi sebagai Faktor Keberhasilan SABUMI

Keberhasilan SABUMI tidak hanya ditentukan oleh inovasi pelayanan, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi program melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, BULOG, BUMDes, distributor pangan, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.



Gambar 4. Model Collaborative Governance SABUMI

Bentuk kolaborasi tersebut mencerminkan penerapan konsep *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu penyelesaian masalah publik melalui kerja sama lintas sektor dengan tujuan mencapai kepentingan bersama.

Kolaborasi tersebut memperkuat empat strategi utama pengendalian inflasi (4K), yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, distribusi bahan pokok menjadi lebih efisien, informasi mengenai kebutuhan masyarakat dapat diperoleh lebih cepat, serta proses pengambilan keputusan menjadi lebih responsif terhadap dinamika harga di lapangan.

Analisis Inovasi SABUMI Berdasarkan Teori Difusi Inovasi

Menurut Rogers (2003), keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh lima karakteristik utama, yaitu *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Berdasarkan hasil penelitian, SABUMI memenuhi kelima karakteristik tersebut. Pertama, *relative advantage* tercermin dari kemampuan SABUMI memberikan pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan operasi pasar konvensional.

Program ini mampu menjangkau masyarakat hingga ke desa terpencil dengan harga bahan pokok yang sesuai HET. Kedua, compatibility terlihat dari kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah diakses, dan tidak bergantung pada jadwal operasi pasar yang terbatas. Ketiga, complexity relatif rendah karena mekanisme pelayanan cukup sederhana. Masyarakat hanya perlu mengajukan permohonan melalui pemerintah desa, hotline, atau media sosial tanpa prosedur administrasi yang rumit. Keempat, trialability ditunjukkan melalui proses pengujian dan evaluasi sebelum implementasi secara penuh sehingga kelemahan sistem dapat diperbaiki terlebih dahulu. Kelima, observability tampak dari hasil yang mudah diamati masyarakat, yaitu tersedianya bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan stabilisasi harga, serta terkendalinya perkembangan harga pangan di wilayah sasaran.

Dampak Implementasi SABUMI

Implementasi SABUMI menunjukkan dampak positif terhadap pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Sukabumi. Program ini mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ratusan desa dan memberikan manfaat kepada ribuan masyarakat penerima layanan. Selain meningkatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, SABUMI juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) melalui intervensi yang lebih cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga. Data pelaksanaan menunjukkan bahwa program telah menjangkau berbagai kecamatan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5.333 dan terus bertambah sejalan dengan pelaksanaan operasionalisasi SABUMI.

Keberhasilan implementasi SABUMI juga memperoleh pengakuan melalui replikasi kerja sama dengan pemerintah

daerah lain. Replikasi tersebut menunjukkan bahwa model inovasi yang dikembangkan memiliki potensi untuk diterapkan pada daerah lain dengan karakteristik permasalahan yang serupa. Hal ini memperlihatkan bahwa SABUMI tidak hanya memberikan manfaat lokal, tetapi juga memiliki nilai sebagai praktik baik (*best practice*) dalam inovasi pelayanan publik di bidang pengendalian inflasi daerah.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengendalian inflasi tidak selalu memerlukan investasi teknologi digital yang kompleks. Keberhasilan SABUMI justru terletak pada kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi antarlembaga, mengembangkan mekanisme pelayanan yang adaptif, serta memanfaatkan sumber pembiayaan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pengembangan inovasi pelayanan publik di bidang stabilisasi harga pangan hendaknya tidak hanya berorientasi pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola kolaboratif, perluasan jaringan distribusi pangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Model SABUMI dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kebijakan bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem pengendalian inflasi yang lebih responsif terhadap kondisi wilayah. Replikasi model ini perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah, kapasitas kelembagaan, dan potensi sumber daya lokal sehingga efektivitas program dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Inovasi SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi) merupakan model inovasi pelayanan publik yang efektif dalam mendukung pengendalian inflasi daerah melalui pendekatan kolaboratif. Program ini

mampu mengatasi keterbatasan pelaksanaan operasi pasar konvensional dengan menghadirkan pelayanan bergerak (*mobile service*), mekanisme pelayanan yang mudah diakses masyarakat, serta skema pendanaan yang lebih fleksibel.

Implementasi SABUMI memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau, memperlancar distribusi pangan, dan mendukung stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH). Temuan penelitian menunjukkan bahwa SABUMI memiliki potensi sebagai model inovasi yang dapat direplikasi di daerah lain dalam upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diperlukan penguatan SABUMI melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja agar efektivitas program dapat diukur secara berkelanjutan.
2. Bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perlu memperluas jejaring kemitraan dengan produsen pangan, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, dan sektor swasta untuk memperkuat rantai pasok pangan serta meningkatkan keberlanjutan skema pendanaan di luar APBD tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Bagi pengembangan inovasi ke depan, pelayanan SABUMI dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi harga pangan secara *real-time*, aplikasi permohonan layanan, serta integrasi data dengan sistem pemantauan harga milik TPID dan Bank Indonesia. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, memperluas

jangkauan pelayanan, dan memperkuat transparansi informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mu032>
- Badan Pangan Nasional. (2023). *Pedoman pelaksanaan Gerakan Pangan Murah*. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2023). *Pedoman Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Food and Agriculture Organization. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pengendalian inflasi daerah*. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *The innovation playbook: Insights from the OECD Observatory of Public Sector Innovation*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Fostering innovation in the public sector*. OECD Publishing.

- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2026). *Dokumen inovasi SABUMI (Sabilulungan untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi)*. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sukmawati, R., & Astutiningsih, E. T. (2025). Dampak bencana terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. PP 354-368. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v10i1.11802>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.